

**ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN
PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
(Studi Kasus Pemerintah Kota di Provinsi Jawa
Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

AFIANI RANIA
NIM. 12020112140112

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Afiani Rania
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140112
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN
PAJAK DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH (Studi Kasus Pemerintah
Kota di Provinsi Jawa Tengah)**
Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si

Semarang, 13 September 2016

Dosen Pembimbing

(Dr. Hadi Sasana, S.E, M.Si)
NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Afiani Rania
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140112
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN
PAJAK DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH (Studi Kasus Pemerintah
Kota di Provinsi Jawa Tengah)**
Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 September 2016

Tim penguji:

1. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si (.....)
2. Deden Dinar Iskandar, S.E., MA (.....)
3. Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D (.....)

Mengetahui
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Afiani Rania, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (Studi Kasus Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 September 2016

Yang membuat pernyataan,

Afiani Rania

NIM. 12020112140112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah: 6-7)

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”

- Benjamin Franklin -

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta

ABSTRACT

Fiscal policy is an action taken by the government in the field of state government budget which is related to tax revenue and government expenditure. In the framework of the implementation of fiscal decentralization, there is the giving task and authority to local governments which means that the local government has the right to regulate their tax revenue and expenditure. The greater amount of tax that government received will result in increased revenues to finance government expenditure, and conversely. It basically gives the understanding that discussion of tax revenues closely related to government expenditure.

This research aims to analyze the causality relationship between tax revenues and government expenditure on the cities of Central Java Province during 2001-2014. This research uses Granger Causality Test. Types of data used in this research is secondary data and panel. The data obtained from the Directorate General of Financial Equalization.

The result showed that there is unidirectional causality from tax revenues to the government expenditure on the cities of Central Java Province. This result support tax-spend hypothesis explained by Friedman (1978) that government expenditure will adjust by tax revenues.

Keywords: Granger causality test, tax revenue, government expenditure

ABSTRAK

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, terjadi pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah yang berarti bahwa pemerintah daerah berhak mengatur penerimaan pajak dan pengeluaran yang akan dilakukan. Semakin besar jumlah pajak yang diterima pemerintah akan berakibat terhadap meningkatnya pendapatan yang diterima pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut pada dasarnya memberikan pemahaman bahwa pembahasan mengenai penerimaan pajak erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah pada kota-kota yang berada di provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2014. Penelitian ini menggunakan metode *Granger Causality Test*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat panel dan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas searah dari penerimaan pajak ke pengeluaran pemerintah di kota-kota Provinsi Jawa Tengah, Hal ini mendukung hipotesis penerimaan pajak-pengeluaran (*tax-spend hypothesis*) yang dikemukakan oleh Friedman (1978) yang menjelaskan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah akan menyesuaikan dengan tingkat pajak yang tersedia.

Kata kunci : *Granger causality test*, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (Studi Kasus Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah)” dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan motivasi dan saran yang berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Darwanto, S.E., M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi selama penulis menjalani studi.
4. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bondan Mardiantho dan Ibu Tri Hening yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moril maupun materiil, curahan kasih sayang dan doa yang tak ternilai bagi penulis.
6. Adik-adikku tercinta, Batara Anggun Pribadi dan Canny Diah Prameswari yang telah menemani, memberikan motivasi serta keceriaan dalam kehidupan penulis.

7. Kawan-kawan receh murah yang sudah seperti keluarga, Nadya Ayu, Yossi Atika, Maylasari, Ria Indriastuti, Wilda Rizkilia yang selalu menemani, memberikan doa dan dukungan, serta berbagi kisah yang tak akan pernah terlupakan.
8. Kawan-kawan glammy, Virgine, Nandahoy, Ujang, Tatak, Jabil, Ikay, Sasaki, Gigih, Ibay, Kemul, Dijun, Galang, Wiem yang selalu memberikan motivasi, mengisi waktu luang dengan hiburan, canda tawa dan momen-momen indah.
9. Alan Ray Farandy dan Saka Wicaksana yang mau meluangkan waktunya dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Yassir Muhammad Harish yang selalu sabar menemani, memberikan perhatian, semangat serta doa untuk penulis.
11. Teman-teman IESP 2012, terimakasih atas semangat, suka, duka dan tawa yang tak pernah henti kalian berikan. Terimakasih telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan untuk penulis selama empat tahun ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Semarang, 7 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Pajak.....	15
2.1.1.1 Definisi Penerimaan Pajak	15
2.1.1.2 Tujuan dan Prinsip Pajak	16
2.1.1.3 Fungsi Pajak	18
2.1.1.4 Pengelompokan Pajak	21
2.1.1.5 Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Komponen Penerimaan Daerah	22
2.1.1.6 Kriteria Pajak Daerah yang Baik.....	24
2.1.2 Insidens Pajak	26

2.1.2.1	Insidens Pajak Anggaran Berimbang (<i>Balanced-Budget Incidence</i>).....	27
2.1.2.2	Insidens Pajak Diferensial (<i>Differential Incidence</i>).....	28
2.1.2.3	Insidens Pajak Absolut (<i>Absolute Incidence</i>).....	30
2.1.3	Pengeluaran Pemerintah	30
2.1.3.1	Faktor Penentu Pengeluaran Pemerintah.....	34
2.1.3.2	Peningkatan Pengeluaran Pemerintah	35
2.1.4	Teori Pengeluaran Pemerintah.....	37
2.1.4.1	Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes	37
2.1.4.2	Model pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	39
2.1.4.3	Hukum Wagner	40
2.1.4.4	Teori Peacock dan Wiseman	42
2.1.5	Kebijakan Fiskal Pemerintah	45
2.1.6	Teori Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah.....	47
2.1.7	Teori Mengenai Kausalitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	49
2.1.8	Hubungan Antara Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	52
2.2	Penelitian Terdahulu.....	53
2.3	Kerangka Pemikiran	58
2.4	Hipotesis.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....		60
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	60
3.1.1	Variabel Penelitian.....	60
3.1.2	Definisi Operasional	60
3.2	Jenis dan Sumber Data	62
3.2.1	Jenis Data.....	62
3.2.2	Sumber Data	62
3.3	Metode Pengumpulan Data	62
3.4	Metode Analisis.....	63

3.4.1 Uji Stasioneritas Data Panel	63
3.4.2 Uji Derajat Integrasi Data Panel	65
3.4.3 Uji Kointegrasi Panel.....	66
3.4.4 Uji Kausalitas Granger (<i>Granger Causality Test</i>)	68
3.4.5 Uji Asumsi Klasik.....	70
3.4.5.1 Uji Normalitas.....	70
3.4.5.2 Uji Multikolinearitas	70
3.4.5.3 Uji Heterokedastisitas	71
3.4.5.4 Uji Autokorelasi.....	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	73
4.1.1 Deskripsi Umum Wilayah Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah	73
4.1.2 Kondisi Perekonomian Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah	78
4.2 Deskripsi Variabel.....	86
4.2.1 Penerimaan Pajak di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah	86
4.2.2 Pengeluaran Pemerintah di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah.....	89
4.3 Analisis Data	93
4.3.1 Hasil Uji Stasioneritas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	93
4.3.2 Hasil Uji Derajat Integrasi Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	94
4.3.3 Hasil Uji Kointegrasi Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	94
4.3.4 Hasil Uji Kausalitas Granger Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	95
4.3.5 Uji Asumsi Klasik.....	96
4.3.5.1 Uji Normalitas.....	96
4.3.5.2 Uji Multikolinearitas	97
4.3.5.3 Uji Heterokedastisitas	97
4.3.5.4 Uji Autokorelasi.....	97
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	98
BAB V PENUTUP.....	100

5.1 Simpulan.....	100
5.2 Keterbatasan	100
5.3 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	5
Tabel 1.3	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	7
Tabel 1.4	Kondisi Umum APBD Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.....	8
Tabel 2.1	Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu.....	56
Tabel 4.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	79
Tabel 4.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang Tahun 2010-2014.....	80
Tabel 4.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta Tahun 2010-2014.....	81
Tabel 4.4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Salatiga Tahun 2010-2014.....	82
Tabel 4.5	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2010-2014.....	83
Tabel 4.6	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	84
Tabel 4.7	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tegal Tahun 2010-2014.....	85
Tabel 4.8	Perkembangan Penerimaan Pajak di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2014.....	86
Tabel 4.9	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2014.....	90
Tabel 4.10	Hasil Uji Im, Pessaran dan Shin Level Difference Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah.....	93
Tabel 4.11	Hasil Uji Im, Pessaran dan Shin Second Difference Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah.....	94
Tabel 4.12	Hasil Uji Kointegrasi Pedroni Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah.....	95
Tabel 4.13	Hasil Uji Kausalitas Granger Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Insidens Pajak Anggaran Berimbang (Balanced-Budget Incidence)	27
Gambar 2.2 Insidens Pajak Diferensial (Differential Incidence)	29
Gambar 2.3 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner	42
Gambar 2.4 Teori Peacock dan Wiseman	44
Gambar 2.5 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	45
Gambar 2.6 Kerangka Hubungan Variabel	59
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Magelang	73
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Surakarta	74
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kota Salatiga	75
Gambar 4.4 Peta Administrasi Kota Semarang	76
Gambar 4.5 Peta Administrasi Kota Pekalongan	77
Gambar 4.6 Peta Administrasi Kota Tegal	78

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	106
Lampiran 1	Data Penerimaan Pajak di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah.....	106
Lampiran 2	Data Pengeluaran Pemerintah di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah.....	107
LAMPIRAN B	108
Lampiran 1	Uji Stasioneritas.....	108
Lampiran 2	Uji Derajat Integrasi.....	109
Lampiran 3	Uji Kointegrasi Pedroni Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah.....	110
Lampiran 4	Uji Kausalitas Granger Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah.....	111
Lampiran 5	Uji Asumsi Klasik.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran belanja merupakan salah satu instrumen fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal bekerja mempengaruhi perekonomian melalui anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi (Musgrave, 1993). Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak, dan atau memperbesar atau memperkecil jumlah pengeluaran pemerintah (Reksoprayitno, 2000). Dalam penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat menurunkan tingkat pajak sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat dan menambah pengeluaran pemerintah yang dilakukan.

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah dan juga konsep desentralisasi fiskal. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2001). Konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follows function* (Bahl, 1998 dalam Mardiasmo, 2006) mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan

diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*revenue assignment*). Hal ini dapat berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Rahmawati, 2008). Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 serta dikeluarkan juga Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Kebijakan otonomi di satu sisi disambut baik oleh sebagian pemerintah daerah, namun di sisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini karena rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2007). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah pusat turut campur tangan melalui pemberian transfer dana perimbangan bagi daerah. Tujuan utama pemberian dana transfer adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidak-efisienan fiskal (Oates, 1999).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan pembagian wilayah administratif terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Potensi penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah daerah berada dalam aktivitas ekonomi. Karakteristik kota yang lebih padat penduduk membuat perputaran kegiatan perekonomian lebih banyak terjadi di kota. Enam kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, penerimaan pada kota-kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah
(dalam juta rupiah)

Kota	Thn	PAD	Jenis Penerimaan	
			Dana Perimbangan	Lain-lain pendapatan yang sah
Magelang	2011	635.558	441.882	0
	2012	91.315	488.403	0
	2013	107.740	431.113	95.907
	2014	164.928	459.785	110.442
Surakarta	2011	181.697	797.686	50.741
	2012	25.727	982.052	25.727
	2013	298.401	1.064.071	22.534
	2014	335.660	797.295	392.621
Salatiga	2011	60.611	398.799	18.762
	2012	77.799	484.525	0
	2013	106.100	497.104	0
	2014	165.747	449.752	112.120
Semarang	2011	521.538	969.374	563.007
	2012	779.616	1.667.822	86.237
	2013	925.919	1.787.969	82.682
	2014	1.138.364	1.274.767	752.881
Pekalongan	2011	63.345	444.414	2.170
	2012	91.206	522.960	0
	2013	114.252	543.308	17.814
	2014	144.075	475.269	142.775
Tegal	2011	117.244	409.240	21.233
	2012	156.663	479.740	14.401
	2013	176.377	531.835	15.755
	2014	241.936	437.444	139.287

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Walaupun penerimaan pemerintah daerah secara keseluruhan masih didominasi oleh penerimaan dari transfer, namun penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD terus memperlihatkan pertumbuhan setiap tahunnya. Tabel 1.2 merupakan tabel pertumbuhan penerimaan pajak pada kota-kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pertumbuhan penerimaan pajak Kota Magelang yang terbesar terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 50,07%. Untuk pertumbuhan penerimaan pajak Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal yang terbesar

semuanya terjadi pada tahun 2011, yaitu berturut-turut sebesar 92,75%; 102,66%; 61,23% dan 59,46%

Tabel 1.2
Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010-2014
(dalam persen)

Tahun	Kota					
	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
2010	12,55	18,17	0,05	14,99	11,56	10,00
2011	40,87	92,75	72,71	102,66	61,23	59,46
2012	32,58	27,85	17,58	65,94	53,69	40,04
2013	50,07	27,65	30,42	14,42	24,23	40,38
2014	17,40	6,62	37,70	15,77	11,05	13,65
Rata-rata	30,69	34,60	31,70	42,76	32,35	32,70

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, diolah

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan adanya konsep desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah berhak mengolah penerimaan yang didapatkannya, termasuk penerimaan dari pajak. Pajak daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Simanjuntak, 2001). Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga alat pengatur keuangan daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan,

membiayai anggota polisi, dan membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan–kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang–barang publik.

Semakin besar jumlah pajak yang diterima pemerintah tentu mengakibatkan peningkatan pendapatan yang diterima pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap lancarnya kegiatan pemerintah. Begitu pula sebaliknya, semakin berkurangnya penerimaan pajak yang diterima akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, sehingga pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak pengeluaran dengan menggunakan sumber-sumber penerimaan yang lain untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah tersebut.

Pengenaan pajak memiliki empat fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan (Direktorat Penyusunan APBN, 2014). Berkaitan dengan fungsi anggaran (*budgetair*), pajak yang dikenakan bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah atau pengeluaran pemerintah.

Uraian yang telah dijelaskan pada dasarnya memberikan pemahaman bahwa pembahasan mengenai penerimaan pajak erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno (2006) pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tergantung kepada banyak faktor, salah satu yang

paling penting adalah proyeksi jumlah pajak yang akan diterima. Makin banyak pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

Dalam teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Apabila keadaan normal terganggu misalnya disebabkan oleh perang atau eksternalitas yang lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya menimbulkan tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar (Mangkoesobroto, 2001).

Tabel 1.3
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2014
(dalam %)

Tahun	Kota					
	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
2010	-0,49	11,11	-4,60	15,60	9,80	1,49
2011	14,57	18,53	9,15	17,22	19,54	18,91
2012	15,02	17,73	21,00	3,16	11,24	12,44
2013	17,46	22,46	-2,92	19,63	20,02	3,38
2014	32,64	18,48	70,64	6,90	25,59	40,20
Rata-rata	15,84	17,66	18,65	12,50	17,24	15,28

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, diolah

Tabel 1.3 merupakan tabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada kota-kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Walaupun pengeluaran pemerintah pada enam kota di Provinsi Jawa

Tengah cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kota Magelang yang terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 32,64%. Untuk pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kota Surakarta dan Kota Semarang yang terbesar terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 22,46% dan 19,63%. Untuk pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu berturut-turut sebesar 70,64%; 25,59% dan 40,20%. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kota Salatiga merupakan yang tertinggi di antara kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah dengan menunjukkan angka sebesar 18,65%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang terkecil terdapat di Kota Semarang, yaitu hanya sebesar 12,50%. Adanya peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut tentu tidak bisa lepas dari meningkatnya penerimaan pajak pada masing-masing kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Tabel 1.4 merupakan gambaran umum mengenai APBD pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 kota-kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus anggaran.

Tabel 1.4
Kondisi Umum APBD Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
(dalam juta rupiah)

Tahun	Kota					
	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
Penerimaan	736.118	1.525.576	727.620	3.166.013	762.120	818.667
Pengeluaran	682.326	1.479.827	645.788	2.957.852	736.794	783.098
Surplus/Defisit	(53.792)	(45.749)	(81.832)	(208.161)	(25.326)	(35.569)

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, diolah

Penelitian terhadap pola atau arah hubungan kausalitas antara tingkat penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi menarik untuk diteliti. Pemahaman terhadap hubungan kausalitas tersebut, selain dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat keputusan anggaran belanja. Menurut Narayan (2005), identifikasi hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai kebijakan yang berbeda dapat membantu dalam mengontrol pertumbuhan anggaran pemerintah. Jika kausalitas berasal dari tingkat penerimaan pajak, maka penurunan pajak untuk mengurangi tingkat defisit akan menyebabkan pengeluaran pemerintah yang cenderung meningkat. Sebaliknya, jika kausalitas berasal dari tingkat pengeluaran pemerintah, maka peningkatan pajak akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Studi mengenai hal ini antara lain dilakukan oleh Cheng (1999). Penelitiannya membahas tentang Hubungan Kausalitas Antara Pajak dan Pengeluaran pemerintah di delapan negara Amerika Latin. Penelitian tersebut menunjukkan hasil adanya kausalitas dua arah (*feedback*) di negara Chile, Panama, Brazil dan Peru. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah saling mempengaruhi. Untuk negara Columbia, Republik Dominican, Honduras dan Paraguay terjadi kausalitas satu arah, yakni peningkatan penerimaan pajak akan mempengaruhi peningkatan pengeluaran pemerintah.

Menurut Narayan (2005), jika pengeluaran pemerintah menyebabkan penerimaan pemerintah, berarti perilaku pemerintah dimulai dari kegiatan pengeluaran, kemudian untuk pembayarannya pemerintah akan menaikkan pajak. Kebijakan menaikkan pajak ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi pada masa yang akan datang.

Studi serupa juga dilakukan oleh Ghumro (2014) yang melakukan penelitian terhadap penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Pakistan pada tahun 1979-2012. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan satu arah dari pengeluaran pemerintah menuju penerimaan pajak dan penelitian ini menerima hipotesis pengeluaran-penerimaan pajak (*spend-tax hypothesis*).

Studi lainnya dilakukan oleh Sriyana (2009) yang menyelidiki hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia pada tahun 1970-2007. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas searah dari penerimaan pajak ke pengeluaran pemerintah pada jangka pendek. Penelitian ini menerima hipotesis penerimaan pajak-pengeluaran (*tax-spend hypothesis*). Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, keterkaitan antara tingkat penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi perhatian dari banyak peneliti sebelumnya. Terdapat empat dalil utama yang berbeda mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Pertama, hipotesis penerimaan pajak-pengeluaran (*tax-spend hypothesis*) yang dikemukakan oleh Friedman (1978) menjelaskan bahwa tingkat pengeluaran menyesuaikan dengan tingkat pajak yang tersedia dan memiliki kausalitas dengan arah dari pajak ke pengeluaran. Disebutkan juga bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pajak adalah positif. Kedua, hipotesis sinkronisasi fiskal (*synchronization fiscal hypothesis*) yang dikemukakan oleh Musgrave (1966) mempostulatkan pemerintah mengambil keputusan atas pajak dan pengeluaran secara simultan dan keduanya mengalami perubahan secara bersama-sama serta menunjukkan kausalitas dua arah. Ketiga, hipotesis pemisahan kelembagaan (*institutional separation hypothesis*) yang dikemukakan oleh Baghestani dan McNown (1994) menyebutkan tidak terdapat hubungan antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Setiap tingkat kelembagaan yang berbeda memiliki fungsi belanja dan pajak yang berbeda, sehingga setiap lembaga memiliki keputusan yang independen terkait dengan pengeluaran dan penerimaan. Keempat, hipotesis pengeluaran-penerimaan pajak (*spend-tax hypothesis*) yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (1979) menjelaskan bahwa pemerintah lebih dulu melakukan belanja dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan terkait pajak,

selanjutnya penerimaan disesuaikan guna mengakomodasi tingkat pengeluaran yang diinginkan.

Dari uraian yang telah dijabarkan, peneliti ingin mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di kota-kota Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, diajukan pertanyaan penelitian berupa :
Bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di kota-kota Provinsi Jawa Tengah tersebut ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di kota-kota Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai hubungan kausalitas antara penerimaan pajak daerah dan pengeluaran pemerintah.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi–instansi yang terkait dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan strategis terkait dengan kausalitas antara penerimaan pajak daerah dengan pengeluaran pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan alur pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang merupakan penjelasan mengenai dasar teoritis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian yang diamati dalam suatu gambar, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari definisi operasional variabel penelitian yang diamati, jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta metode dan alat analisis yang digunakan beserta penjelasan pengukurannya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang terdiri dari seputar deskripsi dari obyek yang diteliti

serta pembahasan mengenai hasil perhitungan data alat analisis yang dipakai.

BAB V PENUTUP

Bab yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan serta saran berdasarkan hasil penelitian.